

# *SUDUT PANDANG WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 (STUDI PADA UMKM DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT*

Fungsiawan<sup>1</sup>, Nurmadhani Fitri Suyuthi<sup>2</sup>, RR Dian Anggraeni<sup>3</sup>, Adibah Yahya<sup>4</sup>, Intan Dyah Pravita<sup>5</sup>

<sup>1,5</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Tangerang Raya

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Fajar

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma

<sup>4</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa

<sup>1</sup>[fungsiawan@untara.ac.id](mailto:fungsiawan@untara.ac.id) (\*)

*Abstract— This study aims to determine the effect of the MSME taxpayer's point of view on the tax obligations of government regulation no. 23 of 2018 (study on MSMEs in Kemayoran, Central Jakarta. This study uses a simple linear regression method by measuring the implementation of MSMEs by meeting the requirements required for taxation. MSMEs are not financial institutions. The results of this study indicate that if it is comprehensive from a mandatory point of view from taxation, from clear insight and knowledge up to 0.05%, the aspect of tax knowledge and mandatory value is the difference, there is no different reference regarding obligatory or taxation.*

*Keywords— MSME, Taxes, required.*

*Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sudut pandang wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 (studi pada UMKM di Kemayoran Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana dengan mengukur pelaksanaan UMKM dengan pemenuhan persyaratan yang diwajibkan atas perpajakan. UMKM bukanlah kelembagaan finansial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika hal yang menyeluruh dari sudut pandang yang wajib dari pajak, dari wawasan dan pengetahuan yang jelas hingga 0.05%. aspek pengetahuan pajak dan nilai yang wajib menjadi pembedanya, tidak adanya pembeda acuan tentang diwajibkannya ataupun perpajakan.*

*Kata kunci— UMKM, Pajak, Wajib.*

## I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sekarang berkembang yang cepat. Kontribusi pada Produk Domestik Bruto (Suci 2017) [8]. Meningkatkan penjumlahan yang menjadikan harapan, faktor yang dapat diterima dari pajak dan sudut pandang masyarakat yang baik. Sudut pandang tersebut, memperlihatkan pemahaman dari apa yang akan diwajibkan, perhitungannya, ataupun hal lain dari pembiayaan. Lapotan hasil survey menyebutkan oleh Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA pada tanggal 6 Agustus 2018 dipaparkan jika 90% respondennya memiliki anggapan wajib memberikan tunai, dengan pengakuan ataupun patuh, pelaporan SPT serta pembayaran perpajakan dari waktu yang telah ada. Menariknya, dari pemeriksaan DJP, dengan angggsuran ataupun penundaan pembayaran perpajakan, dengan isyarat apa yang akan dipahami dan menjadi otoritas pajak ([pajak.go.id](http://pajak.go.id))

Sudut pandang yang diwajibkan dari wawasan yang akan mempengaruhi tingkatan daya patuh dan pemenuhan perpajakannya. Kajian lain mengungkapkan jika apa yang menjadi pengetahuan pajak akan memengaruhi negatif sudut pandang dan menghindarkan perpajakan (Dewi 2017) [2]. kajian mengenai pajak atau apa yang dimiliki contohnya pajak

bumi bangunan [5] wawasan untuk melayani dan hal yang semestinya (Hanifyatun 2016) [3].

Dikarenakan hal tersebut, wawasan sangat krusial untuk peningkatan apa yang diinginkan, pemenuhan yang diwajibkan. Wawasan tersebut dari kemanfaatan pajak, tarifnya ataupun dalam pemberitahuan, sanksi ataupun sistem pembayarannya (Alfiah 2014) [1]. Pengetahuan bisa memengaruhi mutu layanan yang pelaksanaannya yaitu fiskus (Saputro 2018). Dibutuhkan sebagai kajian dan pemahaman dari negara agar tidak menghindari perpajakan.

Kemudahan untuk membayar dan melaporkan pembayaran pajak, kajian ini dengan kajian yang diwajibkan untuk perpajakan dari teknologinya dan perkembangan pada Direktorat Jendral Pajak seperti e-biling, e-filling dan e-spt

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Dipergunakan pada kajian ini yaitu *mix-method* (gabungan kuantitatif), dengan penyebaran kuesioner, wawancara yang dipakai, dengan samplingnya:

- 1) UMKM dengan pemenuhan persyaratan yang diwajibkan atas perpajakan.
  - 2) UMKM bukanlah kelembagaan finansial.
- Dua hal yang dipakai menjadi sudut pandang pada yang wajib dari pajak:

- a. Wawasan mengenai pajak
- b. Efektivitasnya dari sistem pajak

**Uji Hipotesis**

Uji Hipotesis tujuannya melihat apa ada yang membedakan dan uji independen sampel test.

Dari uji hipotesis dengan pelaksanaan yang berbeda dari wajib pajak, apa yang diketahuinya:

- 1) tentang diharuskannya mempunyai wajib pajak, perhitungannya nilai t hitung 7,73 dan
- 2) tentang menghitung perpajakan dengan t hitung 6,630.

Hal itu memperlihatkan hipotesisnya, yang membedakan pajak dengan mempunyai NPWP serta pembeda dari masyarakat, dengan omzet yang relatif rendah, kemudian aturan pajak dengan pemenuhan syarat NPWP. Syarat yang dimaksudkan dengan perolehan tersebut, dibawah 4,8 M dengan pembayaran yang sifatnya selesai. Banyak aturan untuk memperhitungkan dan menjadi sebab pajak pembeda. Kemudian pengetahuan wajib pajak dengan wawasan dan penilaian yang jelas dari acuan yang wajib. Kemudian sudut pandang sistem pajak ini diambil garis besarnya tak ada pembeda dari acuan sistem yang wajib atas UMKM.

Metode dalam mengumpulkan data kajian dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner ialah teknik mengumpulkan data, dengan media ataupun pertanyaan tulisan pada responden yang menjawab (Sugiyono 2013) [9]. Tolak ukur dan modifikasinya, dengan skala liker, yaitu angka 1 diperuntukan pada ketidaksetujuan dan seterusnya hingga sangat setuju. Kemudian, kajian yang menjadi tanya jawab yaitu:

- a. Statistik deskriptif Analisa dipakai melihat dan mengetahui sebarannya dengan perolehan nilai rata ratanya.
- b. Analisa kuantitatif, memakai atau mengurutkan yang benjadi bentuk lebih dulu dari uji normalitas dan validitas.
- c. Analisa kualitatif dipakai untuk memaparkan sudut pandang pajak, memakai tanya jawab yang wajib, memakai otoritas pajak dari Eks Karisidenan Surakarta.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

TABEL I  
SEBARAN DATA PENELITIAN

| Kuisisioner                          | Karyawan  |            |
|--------------------------------------|-----------|------------|
|                                      | Jumlah    | Persen     |
| Kuisisioner yang disebar             | 275       | 100%       |
| Kuisisioner yang kembali             | 110       | 40%        |
| Kuisisioner yang tidak dapat diolah  | 70        | 26%        |
| <b>Kuisisioner yang dapat diolah</b> | <b>40</b> | <b>24%</b> |

Deskripsi Objek kajian obyek dengan analisa responden kajian. Analisisnya memakai profil distribusi, memerhatikan jenis kelamin dan umur, dengan penjelasannya yaitu:

TABEL II  
KARAKTERISTIK OBJEK PENELITIAN

| Karakteristik | Wajib Pajak UMKM |        |
|---------------|------------------|--------|
|               | Frekuensi        | Persen |
| Laki-laki     | 18               | 45%    |
| Perempuan     | 22               | 55%    |

|       |    |      |
|-------|----|------|
| Total | 40 | 100% |
|-------|----|------|

Karakteristik pendistribusian data, dari 40 respondennya dengan 20 laki-laki, dan kemudian sisanya perempuan, sedangkan dibawah tersebut terdiri dari 15 responden, dengan beberapa kriteria lainnya.

TABEL III  
MEAN DAN MODUS

| Pengetahuan Peraturan Perpajakan   | Wajib Pajak |        |
|--|-------------|--------|
|  | Mean        | Modus  |
| 1. Wawasan yang diwajibkan mengenai apa yang diperolehnya, contohnya seperti elektronik.                     | 3,00        | Setuju |
| 2. Masyarakat melihat kegunaan dan kemanfaatan pajak yang dipakai menjadi pembiayaan.                        | 3,18        | Setuju |
| 3. Masyarakat melihat keberagaman yang menjadi pembayaran untuk negara                                       | 3,03        | Setuju |
| 4. Masyarakatnya melihat tentang pajak penghasilan pada negara   | 3,05        | Setuju |
| 5. Masyarakatnya melihat tentang pajak yang bertambah pada negara  | 2,98        | Setuju |
| 6. Masyarakatnya melihat ataupun dengan pendaftaran kepengurusan dari NPWP                                   | 3,23        | Setuju |
| 7. Masyarakatnya melihat perhitungan dan tanggungannya..   | 2,93        | Setuju |
| 8. Masyarakatnya melihat pelaporan pajak dan SPT   | 2,95        | Setuju |
| 9. Masyarakatnya melihat batasan untuk membayar dan melaporkan pajak   | 2,80        | Setuju |
| 10. Masyarakatnya melihat jika yang diwajibkan atas pajak dengan keterlambatan pembayaran dan memiliki denda | 2,60        | Setuju |
| 11. Masyarakatnya melihat pajak sifatnya paksaan dan melanggar, dikenakannya sanksi.                         | 2,60        | Setuju |
| 12. Masyarakatnya melihat jika perolehan imbalan langsung dengan pembayaran                                  | 2,70        | Setuju |

TABEL IV  
MEAN DAN MODUS

| Efektivitas Sistem Perpajakan  | Wajib Pajak |        |
|--|-------------|--------|
|  | Mean        | Modus  |
| 1. Membayar pajak dengan e-banking kemudahan dan keamanan dipercaya.           | 3,23        | Setuju |
| 2. Melaporkan pajaknya dari e-SPT dan e-Filling sangat efektif                 | 3,13        | Setuju |
| 3. Menyampaikan SPT dengan drop box, dengan kemudahan wajib pajak.             | 2,88        | Setuju |
| 4. Aturan pajak yang baru, dengan kemudahan internet dan cepat..               | 3,08        | Setuju |
| 5. Pendaftaran NPWP bisa dengan pelaksanaan pendaftaran.                       | 3,05        | Setuju |
| 6. Fasilitas Call Center atau Kring Pajak ialah dengan pernyataan Wajib Pajak. | 3,05        | Setuju |

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dipakai menjadi tolak ukur kuesioner, dengan konsistensinya dengan pelaksanaan berulang. Uji tersebut memakai tekniknya.

Alpha Cronbach Penyataan dari kuesioner Alpha Cronbach > 0,6 (Duli, 2019). Hasilnya, diperhatikan Tabel 5.

TABEL V  
UJI REABILITAS

| Jenis Pernyataan                 | Karyawan         |    |
|----------------------------------|------------------|----|
|                                  | Cronbach's Alpha | N  |
| Pengetahuan peraturan perpajakan | 0,885            | 12 |
| Efektivitas sistem               | 110              | 6  |

Tabel 5 dapat diperhatikan jika hasilnya dengan Cronbach's Alpha untuk menguji 12 yang dinyatakan menjadi acuan 0,885 dan hasil Cronbach's Alpha menguji 6 yang ditanyakan efektivitas sistem pajak perolehan dan nilai instrumen dengan jawaban yang ada dari 18 pernyataannya dikatakan baik.

#### IV. KESIMPULAN

Kajian ini dengan tujuan melihat sudut pandang dari UMKM pada wajib pajak, melihat pengetahuan serta sistem pajak yaitu.

- a. jika hal yang menyeluruh dari sudut pandang yang wajib dari pajak, dari wawasan dan pengetahuan yang jelas hingga 0.05%. aspek pengetahuan pajak dan nilai yang wajib menjadi pembedanya.
- b. tidak adanya pembeda acuan tentang diwajibkannya ataupun perpajakan.

#### REFERENSI

- [1] Alfiah, Irma. 2014. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan Purwodadi." Universitas Muria Kudus.
- [2] Dewi, Ni Komang Trie Julianti and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak." E-Journal Akuntansi Udayana 18(3).
- [3] Hanifiyatun. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [4] Kamela et al. 2022. Economy And Welfare as Local Government Performance During Election Period. Journal of Management and Business Innovations. Volume: 04, Number: 01, 2022.
- [5] Khoiriyah, Rana. 2018. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." IAIN Surakarta.
- [6] Puspitasari, Nungky Dyah. 2014. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan." Universitas Airlangga.
- [7] Saputro, Muchlis Aji. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi." Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- [8] Suci, Yuli Rahmini. 2017. "Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro Dan Menengah) Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos 6(1).
- [9] Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif. R&D Bandung: Alfa Beta